



Di Nusa Penida

Ditengarai Ada Tanah Negara

Diperjualbelikan

Semarapura (Bali Post) - Masuknya sejumlah investor di Kecamatan Nusa Penida, membuat harga tanah di daerah kepulauan Klungkung ini menjadi amat tinggi. Tawaran dengan harga mahal dari investor membuat sejumlah masyarakat tergiur untuk menjual tanahnya.

Kondisi masyarakat yang mulai beramai-ramai menjual tanah ini menarik keprihatinan wakil rakyat asal Nusa Penida. Pasalnya, sejumlah oknum masyarakat nekat mengambil jalan apa saja untuk dapat menjual tanah di Nusa Penida.

Keprihatinan ini diung-

kapkan Ketua DPRD Klungkung asli Nusa Penida Wayan Baru. Menurutnya, penjualan tanah di Nusa Penida yang sulit dikontrol ini sudah dalam kondisi sangat memprihatinkan. Apalagi banyak oknum masyarakat yang mulai nekat menjual tanah negara yang seharusnya hanya boleh dimanfaatkan masyarakat saja. Menurut Wayan Baru saat ini di Desa Sakti yang menjadi tempat asalnya tersebut, sangat marak terjadi penjualan tanah terutama tanah negara.

Praktik penjualan tanah negara paling banyak terjadi di Dusun Sompang, Desa Sakti, Nusa Penida. Namun sayangnya, praktik penyimpangan tanah negara ini sampai saat ini belum ada penindakan. Padahal, sesuai aturan, tanah negara di Nusa Penida seharusnya hanya boleh dimanfaatkan demi memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari dan tidak diperbolehkan untuk dijual. "Ini bukannya untuk dimanfaatkan tapi malah

memperkaya diri," jelasnya.

Pihaknya menyayangkan kondisi tersebut tidak mendapatkan respons dari pemerintah daerah. Padahal bila dibiarkan, banyak tanah negara yang seharusnya dapat dimanfaatkan masyarakat desa malah beralih ke tangan pribadi. "Saya meminta kepada pemerintah daerah untuk tanggap dengan persoalan ini. Karena banyak tanah negara yang dimohonkan oknum masyarakat malah diperjualbelikan," bebarnya.

Ia pun mengakui, kondisi ini tidak terlepas dari kedatangan para investor ke Nusa Penida menasar lokasi-lokasi yang dipandang menguntungkan dalam sektor pariwisata. Wayan Baru menegaskan, perlu ada peran serta pemerintah dalam menentukan lokasi yang tepat melakukan pembangunan pariwisata. Jangan sampai, keberadaan investor di Nusa Penida malah merugikan masyarakat karena membangun di lokasi yang termasuk radius kesucian pura. (dwa)



Bali Post/dok

NUSA PENIDA- Berkembangnya Nusa Penida, Klungkung sebagai destinasi pariwisata membuat warga setempat tergiur untuk menjual tanah. Ditengarai ada tanah negara yang turut diperjualbelikan. Tampak hamparan lahan di Nusa Penida.



Operasional Tinggi, PDAM Rugi Rp 1 Miliar



Bali Post/sos

Yulawan Askara

Bangli (Bali Post) -

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bangli dari tahun ke tahun mengalami kerugian. Seperti yang terjadi di tahun 2014 ini, PDAM mengalami kerugian sekitar Rp 1 miliar. Hal ini sebagai dampak dari pengeluaran operasional yang lebih besar dari pendapatan serta adanya penyusutan aset.

Direktur PDAM Wayan Gede Yulawan Askara, Minggu (3/5) kemarin mengungkapkan kerugian yang dialami perusahaan memang sangat sulit untuk dihindari.

Persoalan ini seakan-akan telah mendarah daging dan menjadi masalah

klasik dari tahun ke tahun. Dijelaskan, beberapa masalah yang mengakibatkan kerugian ini, yakni biaya operasional yang dikeluarkan khususnya untuk perbaikan jaringan lebih tinggi daripada pendapatan. Disampaikan pendapatan tahun 2014 mencapai Rp 10 miliar, sedangkan biaya operasional 11 miliar sehingga rugi Rp 1 miliar. "Pengeluaran tidak sebanding dengan pemasukan, itu yang menyebabkan kami merugi," katanya.

Dikatakan lebih lanjut, munculnya kerugian juga akibat adanya penyusutan aset berupa mesin dan bangunan yang mencapai sekitar Rp 900 juta. Akibat kerugian ini membuat pihaknya juga tidak bisa membayar pajak pendapatan kepada negara. "Kami tidak dikenakan pajak karena masih defisit. Kalau sudah surplus, baru kami dikenakan pajak," terangnya.

Solusi untuk menutupi kerugian ini, hanya melalui kenaikan tarif. Namun, hal itu dikatakan tidak mungkin bisa dilakukan di tahun ini, mengingat kenaikan tarif itu baru diimbangi dengan pelayanan yang maksimal. Sementara, kondisi jaringan PDAM mengalami kebocoran hingga 29 persen. Angka ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan standar nasional yang mencapai 20 persen. Dijelaskan saat ini, tarif air Rp 1.650 per kubik. Padahal, untuk mengurangi jumlah kerugian, tarif air idealnya sekitar Rp 2.500 per kubik.

Menaikkan tarif dikatakan bukan perkara mudah. Pasalnya, kenaikan ini harus mengacu pada UMK Kabupaten dan disesuaikan dengan asas keadilan. Selain menaikkan tarif air, untuk menekan kerugian pihaknya telah melakukan efisiensi penggunaan energi listrik dan berhasil menekan 40 persen dibandingkan penggunaan solar. Pelanggan tahun ini mencapai 14.000. (kmb45)

Edisi : Senin, 4 Mei 2015

Hal : 10